

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak menjadi negara merdeka pada Agustus 1945 lalu, Indonesia dihadapi dengan berbagai persoalan. Mulai dari berbagai negara yang mengancam untuk menjajah Indonesia, krisis moneter, krisis politik dan berbagai hal lainnya yang terus mengancam stabilitas negeri ini. Hakekat sebuah kemerdekaan Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah mampu mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Untuk itu pemerintah harus berupaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta melakukan pemberdayaan sebagai langkah untuk terus maju supaya mampu bersaing dengan negara lain.

Melihat persaingan dengan negara lain maka pembangunan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Dengan memiliki sumber daya manusia yang unggul maka berbagai pembangunan nasional dalam segala aspek akan menjadi lebih mudah. Perkembangan dalam berbagai bidang juga akan menjadi lebih cepat seperti teknologi, pertanian, pendidikan dan yang lainnya. Pembangunan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang didalamnya sehingga untuk memulai pembangunan sebuah negara maka diperlukan pembangunan sumber daya manusia terlebih dahulu. Dengan demikian pemerintah harus mampu memberdayakan kehidupan

negara. Pemberdayaan kehidupan masyarakat sendiri dapat dimulai dengan memenuhi segala bentuk kebutuhan masyarakat sehingga dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup, masyarakat akan lebih nyaman dan sehat sehingga mampu berpikir dengan lebih cerdas.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dimana hampir sebagian penduduk di Indonesia berprofesi sebagai petani. Potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar dengan melihat garis pantai yang panjang dimana sebagai negara kepulauan seharusnya sumber kehidupan sangat luas. Berbagai daerah atau kawasan subur yang memiliki potensi kuat untuk pengembangan perkebunan dan persawahan disertai musim penghujan sehingga tidak layak jika negara ini bergantung akan kebutuhan pangan dari luar. Namun tidak jarang berbagai permasalahan kebutuhan masih bermunculan di negeri ini walaupun dikenal sebagai negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Seiring dengan berjalannya waktu berbagai dinamika permasalahan terus terjadi mulai dari kemiskinan, pengangguran, kelaparan, gizi buruk bahkan sampai berbagai penyakit yang melanda belahan bumi ibu pertiwi. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus selalu berusaha meningkatkan peran mereka untuk menciptakan stabilitas dalam berbagai hal mulai dari stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan sosial hingga keamanan. Sampai sejauh ini berbagai masalah masih menjadi tantangan bagi pemerintah di Indonesia mulai dari kesenjangan pendidikan, kemiskinan, kawasan kumuh, gizi buruk, pelayanan kesehatan yang kurang memadai hingga masalah infrastruktur

Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam mensejahterakan rakyat dan memelihara orang miskin serta anak terlantar. Selain itu dalam pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa "tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Hal ini berarti bahwa pemerintah harus mampu menjamin setiap warga negaranya hidup dalam keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran sehingga pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang memadai mulai dari pendidikan, kesehatan serta terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok hidup yang terjangkau. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan berbagai macam program atau strategi untuk menstabilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam era globalisasi saat ini pembangunan nasional yang merata perlu mendapat peran dari masyarakat. Sebagai negara yang demokratis masyarakat dituntut untuk berperan aktif untuk menyuarakan hak mereka serta melakukan kewajiban dengan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Disamping itu sejak adanya kebijakan otonomi daerah kini pemerintah di setiap daerah diberikan hak yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola kekayaan dan kebutuhannya sendiri. Dengan demikian akan mempermudah pemerintah untuk mendengarkan dan mengurus kebutuhan masyarakat di daerah.

Tujuan dari otonomi daerah sendiri adalah untuk lebih mensejahterakan masyarakat hingga lapisan bawah sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah manfaatnya dapat tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat

secara merata. Disamping itu juga otonomi daerah akan membantu masyarakat

untuk lebih mudah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yaitu dengan adanya pemerintah di daerah masing – masing yang bertugas untuk menyerap segala keluhan dan tuntutan masyarakat tanpa harus melibatkan pemerintah pusat.

Dalam hal ini tentunya pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mendengar segala keluhan dan tuntutan masyarakat demi tercapainya pembangunan sosial masyarakat yang ada di daerah. Selain itu pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan demi tercapainya program dan kebijakan pemerintah daerah demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai pembangunan sosial masyarakat maka pemerintah daerah tentu harus melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau dan berkualitas sehingga masyarakat daerah dapat melangsungkan hidup yang sehat jasmani dan rohani. Namun yang menjadi permasalahan adalah kebutuhan pokok yang ada tidak semuanya bisa dijangkau oleh masyarakat. Harga kebutuhan pokok sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari inflasi, kenaikan harga BBM, perubahan musim dan lainnya.

Pada tahun 2013 sendiri terjadi berbagai permasalahan ekonomi mulai dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga menjelang Bulan Ramadhan hingga masalah ekonomi lainnya. Salah satu daerah yang mengalami ketidakstabilan harga bahan pokok adalah Kabupaten Bantul, dimana pada tahun 2013 sendiri berbagai harga kebutuhan pokok sering mengalami perubahan harga. Adapun perubahan harga kebutuhan pokok seperti yang dilansir Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perubahan Harga Kebutuhan Pokok Pada Tahun 2013

No	Kebutuhan pokok (1 kg)	Bulan Mei	Juni	Juli
1	Beras	6.750	7.500	6.950
2	Gula Pasir	11.448	12.000	12.300
3	Minyak Goreng Tanpa Merek	9.000	8.000	10.000
4	Telur Ayam Broiler	16.250	18.500	14.200
5	Garam Halus	2.000	1.500	1.200

Sumber : Disperindagkop Kab. Bantul

Melihat perubahan harga diatas menandakan bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat terus mengalami perubahan. Bahkan perubahan harga dapat terjadi setiap minggu hingga hampir setiap harinya. Pemerintah daerah tentunya perlu mengambil berbagai langkah untuk menjadikan harga kebutuhan pokok lebih stabil. Dengan harga stabil akan menjamin masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan teratur setiap harinya sehingga kebutuhan gizi dan yang lainnya terpenuhi. Liputan6.com pada Selasa (18/6/2013) memberitakan bahwa di Bantul, Jawa Tengah. Kenaikan terjadi pada beras dan minyak yang naik sekitar Rp 100 hingga Rp 400 per kg. Kenaikan harga BBM menjelang puasa juga

para pedagang merugi karena sepiya pembeli akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Melihat kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Bantul dimana pada Juli 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul mencatat 33.000 orang masyarakat Bantul merupakan pengangguran. Jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat dengan usia produktif (15 Tahun keatas) yang berjumlah 702.394 orang maka angka pengangguran sendiri mencapai 4,69 persen. Untuk mata pencaharian sendiri masyarakat Bantul mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan presentase 25,56%, perdagangan 21,16%, Industri 18, 95 % dan sisanya di sektor rekonstruksi, jasa, keuangan dan lainnya. Hal ini berarti bahwa mayoritas masyarakat Bantul berada di kondisi menengah kebawah.

Hal ini tentunya mempengaruhi perilaku konsumen terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satunya adalah perubahan frekuensi konsumen dalam mengkonsumsi kebutuhan pokok. Contohnya adalah sejak terjadinya perubahan harga kedelai yang mempengaruhi frekuensi konsumen dalam mengkonsumsi tempe. Seperti yang dikatakan Sriyadi dalam penelitiannya yang berjudul Respon Konsumen Tempe Terhadap Kenaikan Harga Kedelai di Kabupaten Bantul Sejak Terjadinya Kenaikan Harga Kedelai, Kabupaten Bantul sebagai daerah yang memiliki frekuensi yang cukup tinggi dalam mengkonsumsi tempe mengalami perubahan frekuensi

Tabel 1.2
Sebaran Konsumen Berdasarkan Frekuensi Pembelian Tempe Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga Kedelai.

NO	Frekuensi Pembelian	Sebelum	%	Sesudah	%
1	1-3	55	73	60	80
2	4-5	15	20	12	16
3	6-7	5	7	3	4
Jumlah		75	100	75	100

Sumber : Sriyadi, seminar internasional dan call for papers "towards excellent small business" 2011

Dalam tabel tersebut Sriyadi mengatakan bahwa terjadi penurunan frekuensi konsumsi tempe yang semula 6-7 kali dan yang semula 4-5 kali dalam seminggu sebagian besar berubah menjadi 1-3 kali dalam seminggu. Hal ini karena naiknya harga kedelai menjadikan masyarakat harus mengurangi frekuensi konsumsi mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa tempe merupakan salah satu makanan bergizi yang mudah dijangkau masyarakat. Namun dengan terjadinya kenaikan harga kebutuhan gizi masyarakat juga menjadi terancam menurun. Pemerintah daerah tentunya tidak bisa tinggal diam melihat hal ini.

Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk mencari tahu bagaimana pemerintah daerah melakukan peran dan tanggungjawabnya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sehingga lebih stabil dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Secara khusus penelitian ini ingin mengetahui peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul sebagai lembaga pemerintah daerah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Senerti yang kita ketahui kebutuhan pokok sendiri sangat penting bagi

masyarakat karena memang memiliki pengaruh besar sebagai asupan makanan pokok masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu :

Bagaimanakah peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat pada Tahun 2013?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian tentunya peneliti perlu melakukan pemetaan mengenai sasaran dari penelitian yang dilakukan. Dengan adanya ketentuan dari sasaran tersebut akan memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Melakukan identifikasi mengenai peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam mewujudkan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di

D. MANFAAT PENELITIAN

Melihat tujuan dari penelitian ini maka dapat diketahui bahwa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan dan meningkatkan perannya dalam menstabilisasi harga kebutuhan pangan pokok masyarakat.
2. Menjadi sumber referensi dalam studi Ilmu Pemerintahan dengan adanya penjelasan peranan lembaga pemerintah khususnya mengenai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

E. KERANGKA TEORI

1. Peranan

Menurut Horton dan Hunt (1993) peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada status ini oleh Meton (1968) dinamakan perangkat peran (role set). Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹ Peran berarti adanya sebuah tindakan yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab dalam suatu permasalahan tertentu. Hal ini

¹Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. *Sociology*. Edisi keenam. Internasional Student Edition. Tokyo: Mc. Gray Hill Book Company Inc.

menandakan peran itu muncul karena status yang dimiliki seseorang sebagai orang yang menjadi harapan bagi orang lain.

Peran dapat dihubungkan dengan tanggung jawab yang dimiliki seseorang dalam mencapai keberhasilan pembangunan sehingga peran yang dilakukan seseorang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah pembangunan. Salah satunya adalah dalam pembangunan stabilitas ekonomi dimana pihak yang turut berperan adalah pemerintah sehingga pemerintah memiliki peran yaitu turut bertanggung jawab dalam keberhasilan pembangunan stabilitas ekonomi.

Pengertian peran menurut Astri S Susanto adalah “role atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut juga status objektif. Antara peranan dan status saling berkaitan satu sama lainnya, karena status merupakan kedudukan yang memberikan hak dan kewajiban, sedangkan kedua unsur itu tidak ada artinya kalau tidak dipergunakan”². Peran dalam hal ini dikatakan muncul karena adanya status yang memberikan adanya hak dan kewajiban seperti misalnya pemerintah yang memiliki status sebagai pemimpin rakyat yang melahirkan hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat secara penuh dalam berbagai aspek.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia peranan adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. (Est, Harahap, dkk 200:854). Peranan (Role) merupakan proses dinamis kedudukan

² Phil Astrid S. Susanto, *Perang Ideologi dan Perubahan Sosial Bina Cipta*, Jakarta, 1985, Hal

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan dengan benar. Jadi dikatakan bahwa ketika sebuah kewajiban dilakukan dilakukan dengan benar artinya orang tersebut memiliki peranan.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009: 212-213). Menurut WJS Purworatminto peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat
- b. peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi peranan selain lahir karena adanya status sebagai seorang pemimpin atau jabatan tapi peranan merupakan bagian dari tanggung jawab

seseorang terhadap sesuatu yang telah diatur sesuai dengan hak dan kewajiban

yang dimiliki. Dalam hal ini peranan pemerintah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dalam ruang lingkup tertentu sesuai dengan status yang dimiliki yang telah diatur dalam undang-undang. Undang – undang dalam hal ini menjadi salah satu peraturan yang mengatur bagian yang menjadi peranan pemerintah untuk melaksanakan peranannya terhadap masalah yang ada.

2. Pemerintah Daerah

2.1 Pemerintah

Aturan-aturan tentang perilaku itu mengendalikan masyarakat. Jadi pengaturan itu sama artinya dengan pengendalian, kata lain yang bisa juga digunakan untuk pengaturan atau pengendalian adalah pemerintahan. Sebenarnya pemerintah itu pada hakekatnya adalah pengendalian atau pengaturan. Kesimpulan ini dapat juga diperoleh dengan asal dari kata kerja Inggris “govern” (pemerintah), yaitu “governare” (bahasa latin) dan kybernan (bahasa yunani) yang berarti mengendali mengemudi atau memimpin.³

Menurut Mari'un⁴ secara singkat menjelaskan tentang pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut :

- a. Istilah pemerintahan menunjukkan pada bidang atau lapangan fungsi, bidang pemerintah
- b. Istilah pemerintah menunjukkan pada badan atau organisasi alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi itu.

³ Titin Purwaningsih, *Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan*

⁴ Mari'un, *Asas-asas Ilmu Pemerintahan*, PPA, Fakultas Sosial Politik UGM, Yogyakarta 1976

Dalam tipologi intervensi pemerintah dalam The Laissez Faire Society (masyarakat bebas) menurut adam smith tugas pemerintah adalah⁵ :

- a. Melindungi masyarakat dari kekerasan dan invansi yang mungkin dilakukan oleh masyarakat lain (sebagai badan peraturan)
- b. Melindungi individu dalam masyarakat dari ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh individu lain dalam masyarakat tersebut. (administrasi keadilan)
- c. Membangun sarana infrastruktur dan menyediakan barang dan jasa publik.

Fungsi pemerintah adalah untuk mengurus atau menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan para warga negara (baik jasmani maupun rohani). Setidaknya membantu warga negara dalam memenuhi usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya)

Adapun fungsi dasar pemerintah menurut Anderson 13⁶ menyatakan bahwa fungsi dasar pemerintahan adalah :

- Menyediakan infrastruktur
- Menyediakan barang-barang dan jasa publik
- Menyelesaikan konflik-konflik antar kelompok
- Menumbuhkan dan memelihara kompetisi

⁵ Hunges E, *Public Management and Administration and Introduction*, Martin Press, 1994

⁶ibid hal 18-19

- Menjaga agar setiap warga negara dapat memiliki atau mempergunakan barang dan jasa publik taraf minimal yang dibutuhkan.
- Menjaga stabilitas ekonomi

Melihat peran dan fungsi pemerintah diatas dapat diketahui salah satu peranan pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi dimana salah satunya adalah menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat. Untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sendiri, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul melakukan beberapa upaya mulai dari Perlindungan Konsumen dengan melakukan operasi pasar murah, pemantauan secara periodik, sosialisasi dan pembinaan di bidang perdagangan, pengadaan barang dan jasa hingga adanya pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang.⁷

Peran dan Fungsi Pemerintah Secara Umum

Adapun secara umum pemerintah memiliki berbagai peranan yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan (regulasi) merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya

⁷ Program Kerja Diperinci dan SKPD 2013

lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, juga lembaga-lembaga departemen maupun non departemen.

2) Fungsi Pemberdayaan (*empowerment*)

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan yang lainnya. pemberdayaan dari aspek politik adalah upaya penyadaran kepada masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan politik.

Bahwa jika pemberdayaan itu tidak dimulai dari atas maka pemberdayaan itu tidak akan terjadi. Pada dasarnya sudah mempunyai daya melalui pengetahuan dan informasi sehingga pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk mengeluarkan daya yang ada pada masyarakat. Untuk itu maka pemberian informasi yang memadai dari pemerintah merupakan kunci dalam pemberdayaan ini.⁸

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang kehidupan. Namun tentu saja jika pemberdayaan itu harus dimulai dari atas maka untuk memberdayakan masyarakat aparat pemerintah perlu diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran politik, hukum, ekonomi dari aparat pemerintah perlu dimantapkan sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat, karena upaya pemberdayaan ini tidak lepas dari aspek imitasi dan keteladanan dari aparat pemerintah itu sendiri.

3) Fungsi Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan ini juga berarti *civil services* maupun *public services*, hanya saja dalam *civil services* pasti dilaksanakan oleh pemerintah sementara *public services* bisa dikerjakan oleh pemerintah, bekerjasama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh swasta sendiri. Dengan *civil services* dimaksudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besaran imbalan yang diberikan.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal yaitu :

1. Menjamin Keamanan Negara

Pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan bagi seluruh rakyatnya dan fungsi ini pemerintah bertugas menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan

menjaga agar tidak terjadi pemberontakan sehingga masyarakat bisa hidup dengan rasa aman dan tenang.

2. Menjamin Ketertiban

Fungsi ketertiban disini merupakan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat dan memberikan jaminan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan berlangsung secara damai. Perwujudan fungsi pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya lembaga kepolisian, disamping peran birokrasi dan masyarakat.

3. Menjamin Penerapan Keadilan

Adanya fungsi regulasi adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Hukum dan peraturan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan dengan adil dan tidak memihak, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal tersebut menjadi acuan dalam penerapan hukum yang adil, tidak memandang status sosial maupun latarbelakang seseorang. Dengan demikian setiap putusan diambil secara adil dan benar.

4. Pekerjaan Umum dan Pelayanan

Untuk bidang pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau bidang-bidang yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Wujud dalam tugas ini antara lain membangun jalan,

menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana tujuan negara seperti seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, dan mewujudkan kesejahteraan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, sehingga untuk melaksanakan upaya-upaya kearah peningkatan kesejahteraan ini pemerintah terus melakukan berbagai program dan kebijakan nasional. Kesejahteraan sosial sendiri juga telah diatur dalam UUD 1945 seperti dalam pasal 27 ayat 2, pasal 32, pasal 33 maupun pasal 34 dimana diterangkan mulai dari penghidupan yang layak, hak memperoleh pendidikan yang layak serta kondisi fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara.

6. Menerapkan Kebijakan Ekonomi

Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya mengendalikan inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan internasional, serta dengan kebijakan-kebijakan lain yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

7. Memelihara Sumber Daya Alam / Lingkungan

Kelangsungan hidup suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya alam dan terpeliharanya lingkungan hidup. Tugas pemerintah untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini dilakukan dengan berbagai fungsi, baik regulasi pemberdayaan maupun pelayanan itu sendiri. Untuk pemeliharaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup. untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini dilakukan dengan membuat kebijakan atau aturan yang merupakan rambu-rambu dalam mengelola lingkungan hidup.

Dalam menjalankan fungsi atau perannya, pemerintah dapat menggunakan instrumen sebagai berikut :

- Provisi-provisi : Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi
- Subsidi (subsidy)
- Produksi (production)
- Pembuatan peraturan (regulation)⁹

2.2 Pemerintah Daerah

Seperti yang dikatakan dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2004, pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

⁹Titin Purwaningsih, *Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan, Peran Peran Pokok*

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak diberlakukannya asas otonomi daerah dan desentralisasi maka setiap pemerintah daerah berperan terhadap masyarakat di daerah. Berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah daerah mengurus segala urusan pemerintahan yang ada di daerah sesuai dengan asas otonomi daerah dan pembantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Namun pemerintah juga memiliki batasan peran karena tidak semua urusan menjadi urusan pemerintah daerah. Jadi undang-undang telah mengatur urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu :

4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten /kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan bidang pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan

- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dengan melihat urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu salah satunya penanggulangan masalah sosial dan kesehatan dimana hal ini tentunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah berperan penting untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, kemudahan akses pelayanan, hingga kesehatan sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu langkah pemerintah daerah adalah menyediakan kebutuhan pokok yang murah yang sesuai dengan daya beli masyarakat sehingga orang miskin tetap bisa terpenuhi kebutuhannya untuk menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera.

3. Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Menurut Mulyanto kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar atau *basic humans needs* dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu maupun pelayanan sosial tertentu.¹¹ Dr Thee Kian Wie mendefinisikan kebutuhan pokok sebagai suatu paket barang dan jasa yang oleh masyarakat dianggap perlu tersedia bagi setiap orang. Kebutuhan ini merupakan tingkat minimum yang dapat dinikmati oleh seseorang.

¹⁰ UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

¹¹ Gendardj Mulyanto & Hans Kamalijana, *dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

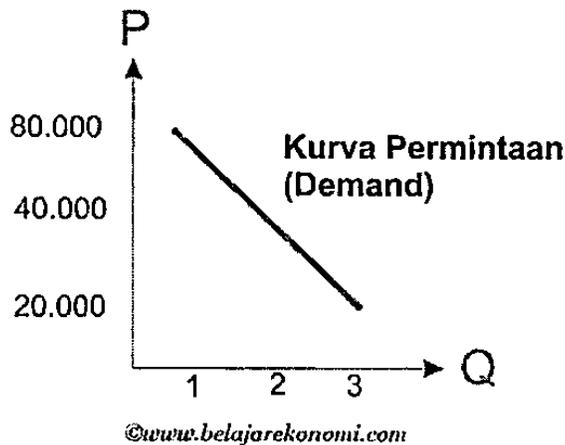
Stabilitas ekonomi merupakan salah satu bagian penting ketika ingin mencapai pembangunan nasional. Dengan kekuatan ekonomi yang stabil tentunya pembangunan nasional dapat diraih dengan lebih mudah. Hal ini dikarenakan stabilitas ekonomi akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Stabilitas ekonomi membawa dampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan struktur harga, perubahan pada penawaran barang dan jasa serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi yaitu kestabilan harga. Harga yang merupakan *resultante* atau hasil interaksi antara permintaan (*demand*) atau penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Untuk memperoleh gambaran kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu dilakukan penghitungan indeks harga. Salah satu indeks harga adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara sederhana IHK merupakan perbandingan antara harga satu kelompok komoditas tertentu terhadap harganya pada waktu dan periode yang telah ditentukan. Kemudian berdasarkan IHK ditentukan inflasi atau deflasi yang mencerminkan kemampuan daya beli dari uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang yang dibelanjakan dan

dengan sendirinya daya beli masyarakat terhadap suatu kebutuhan rumah tangga juga menurun.¹²

Dengan demikian dapat diketahui bahwa stabilitas harga pokok adalah dimana stabilnya kondisi daya beli masyarakat dengan harga komoditas kebutuhan pokok yang beredar di pasar. Daya beli masyarakat cenderung tetap karena harga kebutuhan pokok yang stabil. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam salah satu hukum ekonomi yaitu mengenai permintaan dan penawaran.

Gambar 1.1
Kurva Permintaan



Hukum permintaan mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka permintaan akan barang tersebut semakin menurun. Namun berbeda dengan hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka penawaran semakin tinggi. Dapat dilihat bahwa yang sedang menjadi permasalahan sekarang adalah kenaikan harga kebutuhan pokok terutama sembako yang

menyebabkan permintaan para konsumen menurun. Apalagi dengan harga kebutuhan pokok yang cenderung naik tetapi pendapatan masyarakat cenderung tetap. Jika dibiarkan terus menerus maka dikhawatirkan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan tertentu menurun yang akan sangat mempengaruhi berbagai aspek seperti kesehatan. Kebutuhan pokok sangat erat kaitannya dengan kebutuhan gizi seseorang. Jika dibiarkan terus menerus berbagai kasus di masa lampau dapat terjadi kembali seperti kelaparan, busung lapar, gizi buruk dan lainnya. Pemerintah akan dinilai gagal dalam memegang amanah yang tercantum dalam UUD 1945 untuk menyediakan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi segenap masyarakat Indonesia.

4. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Departemen Perdagangan dan Koperasi merupakan salah satu departemen pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan juga berperan dalam sektor perindustrian perdagangan dan pengembangan koperasi di dalam negeri. Secara tidak langsung segala urusan yang berkaitan dengan perindustrian, perdagangan dan koperasi menjadi tanggungjawab Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Tersedianya kebutuhan pokok serta stabilitas harga barang yang berkaitan dengan perdagangan dan industri tentunya menyangkut dengan Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Untuk setiap daerah, Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sendiri diwakili dengan adanya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang bertanggung jawab pada daerah tertentu. Di kabupaten Bantul, sebagai salah satu daerah kabupaten Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menjadi salahsatu dinas yang bertugas dalam hal perindustrian perdagangan dan koperasi. Seperti yang disebutkan dalam keputusan bupati bantul nomor 155tahun 2001tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas perindustrian perdagangan dan koperasi bahwa dinas perindustrian perdagangan dan koperasi memiliki beberapa tugas seperti :

1. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri;
2. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kegitan industri;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis program, sektoral di bidang perindustrian ;
4. Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan;
5. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan ;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan serta pelaksanaan pameran atau promosi hasil

7. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang perdagangan ;
8. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
9. Penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
10. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
11. Pelaksanaan pemberdayaan kopersi, pengusaha kecil dan menengah;
12. Pemberian perijinan bidang koperasi;
13. Pelaksanaan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
14. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Melihat penjelasan yang ada pada kerangka teori dan latar belakang masalah, maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Peran merupakantingkah laku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sehingga memiliki status atau kedudukan tertentu.
2. Dinas merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas tertentu yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan mengurus bidang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dinas yang terkait adalah

3. Kebutuhan pokok pangan merupakan salah satu kebutuhan utama (basic needs) yang menjadi keperluan hidup manusia untuk mendukung jalannya aktivitas sehari-hari agar dapat melangsungkan hidup dengan baik dan sejahtera.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mempermudah peneliti mencapai tujuan dari penelitian lapangan diperlukan definisi operasional yang menjadi alat ukur dari data yang diinginkan dalam penelitian. Berdasarkan kerangka teori terdahulu dimana menurut Anderson¹³ peran pemerintah adalah Menyediakan infrastruktur, menyediakan barang-barang dan jasa publik, menyelesaikan konflik-konflik antar kelompok sehingga terkait kestabilan harga kebutuhan pokok sendiri dapat ditarik definisi operasional dalam penelitian ini yaitu Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti berikut :

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar
- b. Sosialisasi dan pembinaan di bidang perdagangan
- c. Pemantauan distribusi barang dan jasa
- d. Pengadaan barang kebutuhan pokok
- e. Pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang

H. METODE PENELITIAN

¹³James E. Public Management and Administration, and Introduction, Martin Press, 1994

Penelitian merupakan sebuah prosen pencarian permasalahan dan solusi sebuah permasalahan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Secara umum penelitian memiliki tiga macam tujuan yaitu tujuan yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan.¹⁴ Untuk menjadikan penelitian dijalankan dengan terstruktur hingga mencapai hasil yang lebih ilmiah dan mudah dipahami diperlukan sebuah model atau desain yang sesuai dengan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu metodologi penelitian akan sangat membantu dalam proses penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dengan melihat beberapa rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena dan keadaan sosial dengan cara mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Adapun tipe dari penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri Konsep penelitian kualitatif menunjuk dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang dapat diukur) dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti pada

penelitian kualitatif menyanggahkan diri pada interpretasi atau pandangan sosial yang kritis.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok yang menimbulkan berbagai keluhan masyarakat salah satunya adalah fenomena di Kabupaten Bantul. Selanjutnya akan menginterpretasikan berbagai peran pihak yang terkait yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam memberikan solusi dengan adanya harga kebutuhan yang cenderung naik.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi yaitu di Kabupaten Bantul khususnya di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sebagai salah satu dinas yang berhubungan dengan stabilitas harga kebutuhan pangan masyarakat. Untuk menambah data yang lebih akurat akan didukung dengan pengambilan data di Pasar Bantul. Hal ini untuk membandingkan data yang bersumber dari pihak yang memiliki peran dan dampaknya bagi pihak lain yaitu masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Mudrajat Kuncoro sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini sendiri data primer bisa didapatkan dari pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

¹⁵Lawrence Neuman, *Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches Fourth Edition* (USA : Allyn and Bacon, 2000), page 122.

b. Data Sekunder

Menurut Mudrajat Kuncoro sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain. Data sekunder sendiri bisa diperoleh melalui dokumen-dokumen yang mendukung tercapainya sasaran penelitian ini.

4. Unit Analisa

Sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti maka dapat ditentukan bahwa unit analisa dari penelitian ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bantul. Untuk lebih khususnya unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah peranan baik itu sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang terjadi di pasar sehingga daya beli masyarakat masih seimbang dengan harga yang ditetapkan. Disamping itu juga akan dianalisis bagaimana respon masyarakat terhadap peran yang dilakukan pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok.

5. Teknik Analisa

Teknik analisa data digunakan setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit tertentu, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa mulai dari seleksi data dimana data yang didapatkan dilapangan tidak semuanya harus diambil untuk dianalisis. Tapi peneliti akan melakukan penyaringan data sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan. Selanjutnya yaitu penyajian data dimana semua data yang telah dipilih akan disajikan dalam berbagai bentuk hingga mudah dipahami. Dalam hal ini akan disajikan berbagai macam data mulai dari peran yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok pada tahun 2013. Kemudian berbagai faktor yang mempengaruhi peranan tersebut hingga berjalan efektif atau tidak.

¹⁶ Suwiryo, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2008), hal 147